

**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA
ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA
NEGARA**

SKRIPSI



Oleh :

MUCHAMAD RODI

NBI : 1311700187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA
ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA
NEGARA**

SKRIPSI



Oleh:

MUCHAMAD RODI

NBI : 1311700187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA
ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA
NEGARA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :
MUCHAMAD RODI
NBI : 1311700187**

Dosen Pembimbing :

Sad Praptanto Wibowo, SH., MH.

NPP : 20310870119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA
ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA
NEGARA**

Oleh :

MUCHAMAD RODI

1311700187

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Surabaya

Pada Tanggal 12 Juli 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 357/ST/FH/VII/2021

Ketua : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310870119

Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130612

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310160711

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH
NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchamad Rodi
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA”, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



MUCHAMAD RODI
NBI : 1311700187

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchamad Rodi

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : “AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA”, benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



MUCHAMAD RODI

NBI : 1311700187

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchamad Rodi
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA”, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiarasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



MUCHAMAD RODI

NBI : 1311700187

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchamad Rodi
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul : “AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA”, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diri penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



MUCHAMAD RODI
NBI : 1311700187

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus dan tak dapat dilukis oleh sepatah kata apapun. Kedua orang tua saya telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tetapi saya tidak akan membiarkan itu semua terbang sia-sia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang telah diberikan. Saya akan berusaha untuk mencapai suatu capaian yang terbaik. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk kedua orang tuaku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikannya program Sarjana (S1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada hingga kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menyediakan fasilitas yang memadai selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Sad Praptanto Wibowo S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna perbaikan skripsi ini.
4. Kristoforus L. Kleden S.H., M.H., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan tak terhingga serta memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis.
7. Kepada rekan-rekan yang bersama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Khususnya Moudy dan juga rekan-rekan LANCENG POSANG Ongky, Faris, Ansel, Dwigy, Yayan, Dicky, Nizar, Dipa, Kris, Dwiky dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 19 Juli 2021
Penulis

MUCHAMAD RODI

Abstrak

Dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah adanya wewenang atau kewenangan yang ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi pejabat Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara seseorang/ Badan Hukum Perdata dengan pemerintah tersebut dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat, tetapi juga dapat diselesaikan lewat pengadilan. Sedangkan KTUN menurut ketentuan pasal 1 angka (3) UU 5/1986 *jo.* UU 9/2004 *jo.* UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 76 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut ada dua aturan yang menjelaskan tentang upaya administrasi terdapat dalam UU 5/1986 *jo.* UU 9/2004 *jo.* UU 51/2009 serta terdapat pada UU 30/2013. Untuk itu diperlukan penjelasan lebih konkrit mengenai Upaya hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu timbul rumusan sebaga berikut Apakah Upaya Administrasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dan Apa akibat hukum tidak dilakukannya upaya administrasi dalam menyelesaikan sengketa TUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus. Menurut UU 30/2014 *jo.* Perma 6/2018 menentukan bahwa sengketa TUN harus melalui upaya administrasi terlebih dahulu. Akibat hukum tidak dilakukannya upaya administrasi dalam sengketa TUN hakim wajib memberikan amar putusan “Tidak dapat diterima”.

Kata Kunci : Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya Administrasi, Keputusan Tata Usaha Negara, Pemerintah, Masyarakat.

Abstract

In a State Administrative Decision is the existence of existing authority or authority and which is the basis for State Administrative officials. Settlement of state administrative disputes as a result of a conflict of interest between a person/ Civil Legal Entity and the government can be resolved peacefully through consensus, but can also be resolved through the courts. While KTUN according to the provisions of article 1 number (3) of Law 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. Law 51/2009 on State Administrative Justice Article 76 paragraph (1) of Law 30/2014 states that Government Agencies and/or Officials are authorized to resolve objections to Decisions and/or Actions stipulated and/or performed submitted by Citizens. Based on the description, there are two rules that explain the administrative efforts contained in Law 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. Law 51/2009 and found in Law 30/2013. Therefore, a more concrete explanation is needed on legal efforts in State Administrative disputes. Therefore, the following formulation arises as to whether Administrative Efforts must be made in resolving State Administrative disputes, and what are the legal consequences of not making administrative efforts in resolving TUN disputes. This study uses normative legal research methods, and legal, conceptual, case approaches. According to Law 30/2014 jo Perma 6/2018 stipulates that TUN disputes must go through administrative efforts first. As a result of the law not making administrative efforts in the TUN dispute, the judge must issue a "Unacceptable" verdict.

Keywords: *State Administrative Disputes, Administrative Efforts, State Administrative Decisions, Government, Society.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	9
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Kewenangan.....	11
2.2 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	12
2.3 Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	15
2.4 Pengertian Upaya Administratif	16
2.5 Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
Bab III METODE PELAKSANAAN	19
3.1 Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986.....	19

3.2 Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.....	30
3.3 Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Upaya Administratif	37
3.4 Kasus Sengketa Tata Usaha Negara	46
3.4.1 Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN.Sby	48
3.4.2 Putusan 35/G/2020/PTUN.PBR.....	58
3.4.3 Putusan Nomor 90/G/2020/PTUN.Sby.	63
Bab IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01	40
Gambar 02	45